



BPJS Ketenagakerjaan Bali II Serahkan Piutang Iuran kepada KPKNL Bali

KEPALA BPJS Ketenagakerjaan Bali II A.A. Karma Krisnadi menyerahkan penagihan piutang iuran kepada KPKNL Bali, Jumat (10/4). Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa sejak tahun ini penagihan terhadap iuran menung-gak oleh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan Bali II (wilayah Bali Timur) akan ditagih langsung oleh petugas KPKNL karena tunggakan iuran tersebut merupakan salah satu piutang negara.

Total piutang iuran pe-rusahaan yang diserahkan kepada KPKNL Bali untuk

Tahap I dengan kriteria piutang iuran macet kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bali II sebanyak 78 kasus dengan total piutang sebesar Rp 2.130.389.779,54. Data ini belum merupakan total piutang secara keseluruhan. Secara bertahap akan dilimpahkan kepada KPKNL dalam kurun waktu 3-6 bulan kemudian.

Hal tersebut disambut baik oleh Kepala KPKNL Denpasar Bapak Win Handoyo, yang diwakili oleh Bapak Ngurah Mayun dan Bapak Selamat. Selain ini merupakan program kerja sama yang bersifat nasional, beliau

akan menindak secara serius khususnya di Bali. Penagihan piutang iuran ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin, serta mengoptimalkan manfaat pada peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Karena berlaku asas gotong royong/ subsidi silang, menjadi dana yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja maupun ahli waris yang mengalami risiko sosial seperti Kecelakaan Kerja maupun Kematian di luar hubungan kerja.

Seperti diatur oleh perundangan yang berlaku, setiap perusahaan yang menung-

gak akan dikenakan denda sebesar 2% x total iuran x usia bulan. Dalam PP 86 Tahun 2013 juga dijelaskan jika perusahaan sengaja tidak mendaftarkan tenaga kerjanya maupun tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,

maka izin operasionalnya dapat dicabut dan tidak dapat melanjutkan aktivitas usahanya karena semua layanan publik lainnya (seperti STNK, SIM, KTP, Pajak, Listrik dan Telepon Negara) juga akan diblokir. (ad1111)



Terdakwa Korupsi BBM Bebas Jaksa Siapkan Memori Kasasi

Negara (Bali Post) -

Terdakwa kasus BBM Bersubsidi yang juga mantan Kadis Perindagkop Jembrana, Ni Made Ayu Ardini divonis bebas dalam sidang pengadilan tipikor, Rabu (8/4) lalu. Namun, vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi untuk UD Sumber Maju tersebut belum dapat diterima pihak penuntut umum dari Kejari Negara. Pihak Kejari akan mengajukan memori kasasi ke MA.

Kasi Pidsus Kejari I Putu Sauca Arimbawa Tusan, seizin Kajari, Senin (13/4) mengatakan pihaknya masih menyiapkan memori kasasi tersebut. "Kami akan segera matangkan memori kasasi tersebut setelah menerima salinan putusan bebas dari Pengadilan Tipikor Denpasar. Tapi sampai saat ini kami belum menerima salinan putusannya. Kemungkinan Rabu (15/4) ini baru kita terima," jelas Sauca.

Menurutnya untuk pengajuan memori kasasi tersebut, rencananya dilakukan Rabu (22/4) depan, atau tepat 14 hari setelah keputusan dikeluarkan. "Kami tetap beru-



Bali Post/kmb

**Putu Sauca
Arimbawa Tusan**

paya untuk kasasi karena memang ada kacamata yang berbeda antara kita dengan hakim," ujarnya. Sementara terkait dengan anggota DPRD Jembrana yang menjadi tersangka II Made Sueca Antara alias Dek Cok, pihaknya baru akan mengajukan ke Pengadilan Tipikor Denpasar, setelah mengajukan memori kasasi terhadap keputusan Ayu Ardini yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka I dalam kasus BBM tersebut. Pihaknya kini tinggal membuat rencana dakwaan saja. "Tinggal kita poles-oles lagi, menambah jika ada kekurangan," tambahnya. (kmb)



Proyek Drainase di Pekutatan Belum Dikerjakan

Negara (Bali Post) -

Pembangunan drainase dan trotoar di jalan Pelabuhan Pekutatan, selama hampir sebulan berjalan waktu belum juga digarap. Padahal papan sudah dipasang tepat di depan menuju pantai. Dalam papan informasi itu diketahui sejatinya mulai pengerjaan pada 19 Maret 2015 lalu.

Namun, hingga Senin (13/4) kemarin, belum ada tanda-tanda galian atau penggarapan drainase. Padahal berdasarkan kontrak, proyek senilai Rp 312.388.000 itu tersisa waktu sekitar dua bulan lagi atau tiga bulan pengerjaan. Sejumlah warga ditemui akhir pekan lalu mengaku tidak mengetahui ada proyek itu karena memang belum ada pengerjaan. Material juga tidak satu-pun ada di lokasi yang akan dibuatkan drainase. Namun, papan informasi proyek su-

dah terpasang sejak dua minggu lalu.

Sementara itu, pantauan kemarin siang di lokasi belum nampak proyek mulai dikerjakan. Sepanjang jalan sekitar satu kilo menuju pantai dengan situasi jalan menurun itu belum nampak material ataupun pekerja. Dari informasi di papan proyek itu, kontrak proyek drainase/trotoar mulai tanggal 19 Maret 2015 dengan waktu 90 hari kalender. Proyek tersebut dikerjakan CV Istana Mas dari Probolinggo, Jawa Timur.

Sementara itu, Direktur CV Istana Mas Ajis dikonfirmasi wartawan melalui telepon mengaku baru akan memulai mengerjakan proyek pada Selasa (14/4) ini. Kemarin pihaknya sempat mengecek ke lokasi bersama pengawas proyek. Tukang yang didatangkan dari Probolinggo menurutnya baru datang Senin sore. (kmb26)



Bali Post/olo

KOSONG - Lokasi jalan menuju pantai Pekutatan yang akan dibangun drainase dan trotoar belum nampak tanda-tanda pengerjaan kendati kontrak sudah berjalan hampir sebulan.

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 14



Di SMAN 1 Kintamani Dana BOS Digunakan untuk Beli Air

Bangli (Bali Post) -

SMAN 1 Kintamani yang berlokasi di Desa Bayung Gede, Kintamani selama ini mengalami kesulitan air bersih. Untuk keperluan toilet, pihak sekolah terpaksa membeli air hingga ratusan ribu rupiah dalam setiap minggunya. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air dari PDAM.

Adanya persoalan kesulitan air bersih itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Komang Carles, usai melakukan monitoring pelaksanaan ujian nasional (UN) bersama sejumlah anggota Komisi II di sekolah setempat, Senin (13/4) kemarin. Carles mengatakan, dari hasil komunikasinya dengan pihak sekolah diketa-

hui bahwa selama ini SMAN 1 Kintamani menjadi sekolah yang sangat sulit mendapatkan air bersih.

Untuk memenuhi keperluan toilet guru maupun siswa, pihak sekolah terpaksa membeli air dalam truk tangki. "Karena sulit mendapat air, sekolah selama ini terpaksa beli air dua truk untuk setiap

minggunya," terangnya. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi II lainnya Wayan Jamin. Dia mengatakan, untuk membeli satu truk tangki air bersih, sekolah harus mengeluarkan biaya Rp 150 ribu. Sehingga dalam sebulan sekolah minimal harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,2 juta untuk membeli

air bersih.

"Belum lagi saat musim kemarau, kebutuhannya bisa lebih dari itu," ujarnya. Untuk membeli air bersih, pihak sekolah selama ini menggunakan dana yang bersumber dari dana Komite dan BOS. Jamin mengatakan kondisi kesulitan air bersih yang dialami SMAN 1 Kintamani terjadi akibat minimnya pasokan air dari PDAM. Kondisi ini pun sebenarnya dialami sebagian besar warga di Kintamani.

Terkait hal tersebut, Jamin

berharap Pemkab melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) bisa segera mencari jalan keluar atas persoalan itu. Salah satunya dengan membuat sumur bor. Mengingat di wilayah Kintamani selama ini terdapat beberapa titik sumber air yang bisa diangkat untuk dimanfaatkan. "Walaupun selama ini kesulitan air bersih, tapi saya salut karena pihak sekolah mampu menjaga kebersihan sekolah, termasuk toiletnya," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 10



Perizinan Reklame di Denpasar

✓ Dugaan Penyimpangan

Giliran Kadis Perhubungan Diperiksa Kejati

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus mengembangkan kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan di Pemkot Denpasar. Senin (13/4) kemarin, giliran pihak Dinas Perhubungan Pemkot Denpasar yang dilakukan pemeriksaan guna menguak dugaan kasus penyelewengan perizinan reklame di Kota Denpasar. "Untuk kasus di Denpasar, masih dilakukan pemeriksaan. Hari ini (kemarin - red) dari Perhubungan yang kami mintai keterangan," tandas Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan.

Hanya soal hasil pemeriksaan, dia tidak mau member secara rinci dengan alasan perkaranya masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan informasi dari penyidik, pejabat yang diperiksa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gede Astika. Dia dimintai keterangan oleh jaksa Subawa. Sumber tadi mengatakan, Kadishub Astika dipanggil dan dimintai keterangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk jajarannya terhadap perizinan reklame selama ini.

Siang kemarin, Gede Astika memang dimintai keterangan. Dia keluar dari lantai dua Kejati Bali sekitar pukul 13.00 Wita. Saat dimintai konfirmasi sesaat hendak masuk ke mobil dinas, Gede Astika mengatakan, dia datang ke Kejati Bali atas panggilan pihak jaksa untuk menyelidiki kasus reklame

yang ada di Kota Denpasar. Dia mengatakan dipanggil karena masuk sebagai salah satu tim reklame Kota Denpasar bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lainnya. "Kami dimintai keterangan karena kami masuk tim reklame. Jadi anggota juga," katanya.

Mengenai pertanyaan yang diajukan jaksa, Astika tak memaparkan secara detail. Namun, dia mengakui tak banyak yang ditanyakan jaksa karena tupoksi dari SKPD yang dipimpinnya hanya memiliki peran sedikit, yakni memberikan kriteria tempat pemasangan reklame di sempadan jalan. "Pada intinya, reklame yang dipasang jangan sampai menghalangi rambu lalu lintas. Dengan demikian, rambu yang dipasang dapat sesuai dengan peruntukannya," jelasnya.

Ditambahkannya, setelah sesuai dengan ketentuan

tersebut, dikembalikan kepada tim, kemudian perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM) Kota Denpasar.

Mengenai dugaan adanya penyelewengan izin dan pajak reklame, Astika tak mau menjawab, dengan alasan dia hanya ditanya soal tupoksi tersebut. "Saya hanya ditanya soal itu saja (tupoksi)," tandas Astika.

Saat disinggung soal jumlah pertanyaan, Astika kembali mengatakan bahwa sebagai tim pemasangan reklame, tugas Dishub bagaimana? "Jangan mengganggu pejalan kaki, reklame terlalu tinggi, dan lainnya," kata Gede Astika.

Hingga saat ini, memang jaksa belum menetapkan tersangka terkait dugaan penyelewengan ini. Penyidik korps Adyaksa masih intens



memeriksa saksi. Selain memeriksa Kadis Perhubungan, sejumlah pejabat teras di jajaran Pemkot Denpasar sudah diperiksa. Di antaranya Kepala BPTSP dan PM A.A Rai Soryawan, Kadis DTRP Made Kusuma Diputra, Kadis Pendapatan Dewa Semadi, Kadis DKP Ketut Wisada dan Kasatpol PP I.B. Alit

Wiradana.

Sementara terkait dugaan korupsi pavingisasi, pihak Kejari Denpasar yang sudah menerima berkas tahap I, sudah mempelajrinya. Berkas yang sudah menetapkan dua tersangka itu bakal segera dikembalikan ke Sat. Reskrim Polresta Denpasar. (kmb37)



Bali Post/asa

KETERANGAN - Kadishub Kota Denpasar Gede Astika memberikan penjelasan sesaat setelah dimintai keterangan oleh petugas Kejati Bali, Senin (13/4) kemarin.

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 3



KPU Ajukan Anggaran ✓ APK Rp 1,3 M

Amlapura (Bali Post) -

Pada APBD Perubahan 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem akan kembali mengajukan anggaran persiapan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2015. Penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang nilainya mencapai Rp 1,3 miliar. Sebelum anggaran tersebut keluar, KPU akan menggunakan anggaran pembuatan TPS dan biaya honor penyelenggara. Mengingat, pemasangan APK harus dilakukan tiga hari setelah penetapan pasangan calon.

Ketua KPU Karangasem, I Made Arnawa menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang bisa ditambah maupun dikurangi pada draf PKPU. Pada anggaran induk, kegiatan uji publik yang sebelumnya tercantum kini telah dihapuskan. Namun anggaran yang telanjur dialokasikan tersebut akan diganti dengan pembuatan dan pemasangan APK bagi pasangan calon. "Kini di draf PKPU yang baru ada item pemasangan APK bagi seluruh pasangan calon yang nanti dibuat KPU. Sebelumnya kan tidak tercantum itu," tuturnya saat ditemui di Kantor KPU Karangasem, Senin (13/4) kemarin.

Menurutnya, anggaran APK tersebut harus dipasang tiga hari setelah penetapan pasangan calon yang dilaksanakan 24 Agustus nanti. Sehingga tidak mungkin menunggu anggaran perubahan turun dulu. Pihaknya terpaksa harus menggunakan anggaran pembuatan TPS dan biaya honor penyelenggara untuk menalangi kebutuhan APK ini. Meski terjadi perubahan penggunaan anggaran, menurutnya tidak akan memengaruhi pelaksanaan Pilkada. "APK sudah harus kita pasang tiga hari setelah penetapan pasangan calon, yakni sekitar Agustus, bulan itu kan APBD Perubahan belum jalan, makanya kita tukar terlebih dahulu," jelasnya.

Untuk penyediaan APK termasuk pemasangan, KPU telah merencanakan anggaran Rp 1,3 miliar lebih. Sehingga total keseluruhan yang direncanakan dan akan diajukan ke pemerintah daerah dalam APBD perubahan nanti Rp 2,3 miliar lebih. Sedangkan anggaran untuk honor menurutnya bisa dibayar sesuai Pilkada. "Makanya anggaran honor kita pakai untuk pembuatan APK. Nantinya rancangan kegiatan lainnya yang belum diajukan saat pengajuan APBD induk akan diajukan," ujar Arnawa. (dwa)



Kualitas Proyek Kolam Renang Rendah

Dewan Segera Panggil Kontraktor Pelaksana

Singaraja (Bali Post) –

Sejak proyek pembangunan kolam renang bertaraf internasional di Kelurahan Banyuasri, Singaraja dimulai, berkali-kali dewan melakukan monitoring ke lokasi proyek. Hasilnya, pengawasan terhadap proyek senilai Rp 10 miliar tersebut lemah. Kalau kondisi ini dibiarkan dikhawatirkan bisa saja kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan *detail engeneering design* (DED). Untuk meminta tanggung jawab dan klarifikasi terhadap temuan di lapangan, dewan pun merencanakan memanggil kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, SKPD pengguna anggaran dalam proyek ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Made Adi Purna Wijaya, saat melakukan monitoring ke lokasi proyek, Senin (13/4) kemarin. Dalam kunjungannya itu, dia didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa bersama sejumlah anggotanya.

Wakil Ketua Dewan I Made Adi Purna Wijaya usai meninjau pelaksanaan proyek kolam renang kemarin, menegaskan, lembaganya sangat berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek. Hal ini karena sesuai komitmen dewan bersama-sama pemerintah daerah agar setiap pembangunan yang menelan dana besar, pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan jaminan kualitas, sehingga fasilitas yang telah dibangun ini bertahan dalam batas waktu yang wajar dan sesuai dengan

dokumen perencanaan yang ada. "Kita bukan mencari kesalahan pemerintah atau siapa pun, namun karena proyek ini menggunakan anggaran besar, kami wajib mengawasi dan kelemahan yang ada itu harus diselesaikan sehingga kualitas pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan," katanya.

Senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Buleleng, I Putu Mangku Budiasa. Dia mengatakan, dari hasil temuan selama melakukan pemantauan ke lokasi proyek kolam renang, pihaknya mengagendakan akan memanggil pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, SKPD pengguna anggaran, dan instansi terkait lainnya.

Dewan ingin mendapatkan klarifikasi terkait kelemahan pengawasan proyek kolam renang. Apalagi untuk proyek kolam renang ini di

tengah perjalanan proyek diketahui konsultan pengawasnya telah berganti dengan konsultan pengawas yang baru. Selain itu, dalam beberapa waktu monitoring, ditemukan item pekerjaan yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh konsultan pengawas, namun fakta dalam dokumen di lapangan ditemukan hanya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini mengundang pertanyaan besar dan kalau dibiarkan dikhawatirkan pelaksanaan proyek di lapangan menyimpang dari dokumen perencanaan yang sudah disusun sejak awal. "Kami khawatir kalau ini dibiarkan akan berdampak pada kualitas pekerjaan proyek itu. Kami akan minta klarifikasi dengan memanggil kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan SKPD pengguna anggaran," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 12



Bali Post



Pariwisata Bali Bukan untuk Kapitalis

Penyelamatan Lingkungan dan Kawasan Suci Jadi Prioritas

PARIWISATA Bali adalah pariwisata budaya yang berbasis pada Tri Hita Karana. Artinya pembangunan di Bali, terlebih pariwisata, harus mengacu pada kedua hal tersebut. Karenanya Bali jangan disamakan dengan daerah lain, apalagi negara lain. Tidak! Bali telah memiliki ciri khas sesuai dengan akar budaya Bali yang sangat menghormati lingkungan. Jadi, akan sangat menyimpang apabila pengembangan pariwisata Bali dilakukan dengan merusak alam. Apalagi dengan me-*ngurug* laut yang merupakan kawasan suci bagi umat Hindu, mayoritas agama penduduk di Bali.

Demikian rangkuman pendapat akademisi, ekonom dan tokoh masyarakat di Bali menanggapi pernyataan pemilik kelompok usaha Artha Graha Tomy Winata sekaligus investor PT Tirta

Wahana Bali Internasional (TWBI), yang mempertanyakan penolakan sejumlah pihak terkait revitalisasi Teluk Benoa padahal proyek tersebut dimaksudkan untuk membangun pariwisata Bali.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) wilayah Bali Putu Anom menyatakan, mengangkat pariwisata Bali dengan mereklamasi Teluk Benoa agar tidak kalah saing dengan negara lain, merupakan

alasan yang tidak tepat. Pariwisata Bali yang berlandaskan budaya tidak bisa disamakan dengan pariwisata yang berkembang di negara lainnya.

Hal. 23

Luar Negeri

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 1



Dari Hal. 1

"Membangun pariwisata Bali jangan disamakan dengan daerah tujuan wisata (DTW) di luar Bali, seperti Jakarta atau luar negeri, seperti Singapura," ungkap Putu Anom, Senin (13/4) kemarin.

Menurutnya, keunikan Bali harus tetap menjadi ikon Bali, baik alam maupun sosial budayanya. Sebab, motivasi wisatawan berkunjung mencari sesuatu yang beda di daerah atau negara asalnya. Masyarakat Bali tidak alergi dengan investor dalam mendukung pembangunan. Namun investor yang ingin berinvestasi wajib mengacu pada konsep Tri Hita Karana agar terwujud keharmonisan dalam kehidupan. Selain itu, investor juga harus tetap mengacu kepada Perda Pariwisata Budaya yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama Hindu, RTRWP Bali, RTRW kabupaten/kota.

dimiliki ini mesti diperkuat lagi. "Artinya ketika sebuah daerah dikembangkan sebagai destinasi wisata, maka harus mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, jangan mereka sampai tergusur. Tidak hanya orientasinya untuk kaum kapitalis atau pemilik modal," tandasnya.

"Pada prinsipnya kita tidak menolak kehadiran investor untuk membangun Bali, tetapi investor agar membangun di Bali dengan memperhatikan lingkungan, kawasan suci dan juga mengutamakan pemerataan pembangunan di semua wilayah, bukan semua memilih membangun di Bali Selatan," tegasnya.

Ia melihat Bali Selatan telah mengalami *over capacity*, sehingga banyak memunculkan permasalahan. Karena itu, masalah moratorium memang harus dilaksanakan dan harus secara tegas dilaksanakan oleh pemerintah (eksekutif) sebagai pengambil, penentu dan yang memutuskan kebijakan publik dengan persetujuan legislatif.

"Wakil rakyat harus cermat menyerap aspirasi masyarakat dari semua kalangan. Apalagi, sekarang rakyat Bali sedang menung-

Seperti halnya rencana reklamasi Teluk Benoa, Sendra menegaskan bila Rapat Senat Universitas Udayana telah menyatakan tidak layak. Investor, menurutnya, lebih baik menyelesaikan proyek reklamasi Serangan, sebelum membuat kesalahan kedua dengan mereklamasi Teluk Benoa. Mengingat reklamasi Serangan juga telah menimbulkan dampak lingkungan. Salah satunya abrasi hebat di Pantai Lebih, Gianyar.

Luar Negeri

gu kepastian sikap PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Apakah PDI-P akan menolak atau menyetujui reklamasi Teluk Benoa?" sebutnya.

Partai ber lambang kepala banteng ini, kata dosen Pariwisata Unud ini, paling berpeluang memberi masukan kepada Presiden dalam mengambil kebijakan yang strategis, terutama kebijakan publik yang menyangkut *public sector*.

Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Drs. I Made Sendra, M.Si., Senin kemarin mengatakan, pengembangan pariwisata Bali harus sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Perda tentang *Cultural Tourism*. Dalam perda itu diatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia sesuai ajaran Tri Hita Karana. Menurut Sendra, pedoman yang sudah



Pascadivonis Dua Tahun

Astawa Dibidik Kasus Penggelapan Bansos

Amlapura (Bali Post) -

Satreskrim Polres Karangasem membidik terdakwa kasus penggelapan dana bantuan kompensasi pemanfaatan air subak dari PDAM Karangasem, I Gede Astawa (30), yang kini ada di dalam jeruji besi. Bendahara non-aktif Desa Adat Tauka, Kecamatan Abang, Karangasem ini diduga telah merugikan negara Rp 160 juta karena menggelapkan dana Bansos Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Satreskrim Polres Karangasem kini membidik kasus penggelapan dana Bansos dari pemerintah tingkat I dan II di Desa Adat Tauka. Terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman dua tahun penjara setelah divonis tahun 2014 lalu, akan kembali berurusan dengan aparat kepolisian dengan

kasus berbeda.

Kasat Reskrim Polres Karangasem, AKP Dewa Putu Gede Anom Danuwijaya, mengungkapkan saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kasus penggelapan yang dilakukan Gede Astawa. Menurutnya, terdakwa yang kini menjalani hukumannya ini akan

diproses terkait penggulangan Bansos sejak tahun 2011 hingga 2013 terkait proyek pengerjaan balai kambang di pura setempat.

Menurutnya, kasus penggelapan ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat terkait lenyapnya sejumlah anggaran Bansos Desa Adat Tauka. "Kini

kasus tersebut masih diproses dan masih lidik. Kita proses laporan masyarakat ini, kini pelakunya sedang menjalani hukuman dengan kasus berbeda," ujarnya Senin (13/4) kemarin.

Untuk memastikan berapa kerugian yang ditanggung negara akibat penggelapan tersebut, kini Tim penyidik Unit Tipikor Sat. Reskrim Polres Karangasem yang dipimpin Iptu Agus Wicaksana sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Perkiraan se-

mentara, pelaku yang sempat mengelola bansos tersebut telah merugikan negara mencapai Rp 160 juta.

Sedangkan terkait dengan kasus kelompok fiktif Tani Ternak Pucang Sari di Dusun Puragae, Pempatan, Rendang, pihaknya sudah melengkapi berkas yang sebelumnya dikembalikan karena kekurangan (P19). Pelengkapan berkas tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Amlapura minggu lalu dan kini tinggal menunggu pemberitahuan P21. (dwa)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 15



Pencaplokan Sempadan Pantai di Canggu Lindungi Kepentingan Masyarakat, Bupati Gde Agung Minta Diambil Tindakan Tegas

MASALAH pencaplokan sempadan pantai di Canggu yang dinilai telah menimbulkan keaduan serta protes masyarakat, mendapat perhatian serius Pemkab Badung. Bupati Badung A.A. Gde Agung di hadapan SKPD terkait di lingkungan Pemkab Badung di Mangu-pura, Senin (13/4) kemarin, meminta segenap jajarannya untuk mengambil

tindakan tegas. "Kehadiran pemerintah adalah wajib melindungi kepentingan masyarakat umum. Terlebih, untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan *sradha bhakti*-nya yakni untuk akses jalan melakukan *pamelastian*, akses jalan menuju *setra* dan akses jalan melaksanakan bakti dan upacara di Pura Batu Mejan tersebut, wajib dilindungi," tegasnya.

Dikatakannya, dalam menyikapi permasalahan adanya tembok pembatas atau *panyenger*, posisi Pemkab adalah tegas dengan berpijak pada aturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, Bupati dengan tegas meminta kepada Satpol PP Badung melakukan tindakan tegas dengan melakukan penertiban. Meski demikian, pihaknya sekali lagi meminta agar hari ini, Selasa (14/4), mengecek dengan teliti



Bupati A.A. Gde Agung

dengan melibatkan segenap SKPD terkait, sehingga langkah penertiban terhadap tembok yang dibangun oleh Canggu Intercontinental tersebut dapat berjalan dengan mengikuti prinsip-prinsip normatif dan prosedural.

Penegasan sikap Bupati tersebut disampaikan saat rapat koordinasi teknis dengan sejumlah instansi terkait ling-

kup Pemkab Badung, yang dihadiri Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Kepala BPPT Made Utama, Kadis DCK Desi Dharmayanti, Kepala BLH Badung Ketut Sudarsana, Kasatpol PP Ketut Marta, Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny, staf Perbekel Canggu serta SKPD terkait lainnya di Ruang Rapat Bupati Badung. Menurut Bupati Gde Agung, apa pun bentuk bangunan yang dibangun wajib mengikuti aturan serta ketentuan dari instansi yang berwenang.

Bupati minta agar staf jajarannya meneliti di lapangan, bahwa tembok yang dibangun tersebut harus memiliki izin Revertmen bila hal tersebut difungsikan untuk menahan ombak, serta wajib mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Revertmen. Sementara berkenaan dengan adanya kesepakatan dengan warga, Gde Agung

kembali menegaskan, apa pun bentuk kesepakatan yang dibuat tidak boleh merugikan kepentingan umum. Apalagi untuk melaksanakan kewajiban ibadah agama, adat dan budaya.

Hal senada diungkapkan Sekda Badung Kompyang R. Swandika, bila terdapat permasalahan berkenaan dengan persoalan tanah atau sengketa atas tanah adalah kewajiban pemerintah untuk memfasilitasinya. Terkait tembok ini, harus mengikuti peraturan. Demikian pula kalau Revertmen, harus ada izinnya. Sesuai dengan aturan, selama ini kalau tembok itu berfungsi revertmen, itu wajib ada izinnya. Selama ini, jalan tersebut secara *de facto* telah dipakai masyarakat umum. Maka dari itu, wajib diutamakan termasuk untuk akses jalan menuju ke Pura Batu Mejan.

Camat Kuta Utara menyebutkan, situasi yang terjadi di bawah memang ada pertanyaan masyarakat dan dianggap terjadi pencaplokan sempadan pantai. Awalnya, sesungguhnya masyarakat sangat *welcome*, masyarakat tidak apriori terkait pembangunan pariwisata. Pihak investor juga sudah sosialisasi. Namun dalam perkembangannya, kesepakatan ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Bila dilihat dari perencanaan yang ada, nampaknya belum bisa diterima masyarakat. Masyarakat sangat keras menolak pembangunan tembok yang menghalangi akses mereka untuk melakukan ritual keagamaan dan adat. (ad1106)



Proyek Drainase di Pekutatan Belum Dikerjakan

Negara (Bali Post) -

Pembangunan drainase dan trotoar di jalan Pelabuhan Pekutatan, selama hampir sebulan berjalan waktu belum juga digarap. Padahal papan sudah dipasang tepat di depan menuju pantai. Dalam papan informasi itu diketahui sejatinya mulai pengerjaan pada 19 Maret 2015 lalu.

Namun, hingga Senin (13/4) kemarin, belum ada tanda-tanda galian atau penggarapan drainase. Padahal berdasarkan kontrak, proyek senilai Rp 312.388.000 itu tersisa waktu sekitar dua bulan lagi atau tiga bulan pengerjaan. Sejumlah warga ditemui akhir pekan lalu mengaku tidak mengetahui ada proyek itu karena memang belum ada pengerjaan. Material juga tidak satu-pun ada di lokasi yang akan dibuatkan drainase. Namun, papan informasi proyek su-

dah terpasang sejak dua minggu lalu.

Sementara itu, pantauan kemarin siang di lokasi belum nampak proyek mulai dikerjakan. Sepanjang jalan sekitar satu kilo menuju pantai dengan situasi jalan menurun itu belum nampak material ataupun pekerja. Dari informasi di papan proyek itu, kontrak proyek drainase/trotoar mulai tanggal 19 Maret 2015 dengan waktu 90 hari kalender. Proyek tersebut dikerjakan CV Istana Mas dari Probolinggo, Jawa Timur.

Sementara itu, Direktur CV Istana Mas Ajis dikonfirmasi wartawan melalui telepon mengaku baru akan memulai mengerjakan proyek pada Selasa (14/4) ini. Kemarin pihaknya sempat mengecek ke lokasi bersama pengawas proyek. Tukang yang didatangkan dari Probolinggo menurutnya baru datang Senin sore. (kmb26)



Bali Post/olo

KOSONG - Lokasi jalan menuju pantai Pekutatan yang akan dibangun drainase dan trotoar belum nampak tanda-tanda pengerjaan kendati kontrak sudah berjalan hampir sebulan.

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 14



Terminal Kargo "Overload", Dishub Denpasar Upayakan Perluasan

Denpasar (Bali Post) -

Terminal Barang Kargo Denpasar sudah *overload*, sehingga tak mampu lagi menampung jumlah truk yang akan bongkar muat. Akibatnya, truk banyak yang parkir di Jalan Mahendradatta. Dinas Perhubungan Kota Denpasar masih mencari solusi atas permasalahan tersebut, salah satunya mengupayakan perluasan lahan terminal.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Hari Edi didampingi Kepala UPT Terminal Barang I Nyoman Sujarka, Senin (13/4) kemarin mengatakan, daya tampung Terminal Kargo sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan bongkar muat truk yang datang. Menurutnya, truk yang keluar-masuk terminal rata-rata 400 per harinya. Padahal dengan luas lahan 2 hektar dan 16 gudang bongkar muat, truk yang bisa masuk hanya 70 unit. "Jadi tidak sebanding, karena lahan yang ada kurang memadai. Makanya, Terminal Barang Kargo untuk bongkar muat barang tidak bisa maksimal," katanya.

Lantaran daya tampung terbatas, truk yang hendak bongkar muat terpaksa harus menunggu giliran masuk terminal. Inilah yang kemudian membuat truk-truk banyak yang parkir di tepi Jalan Mahendradatta. Pihaknya memberikan batas waktu bagi truk-truk melakukan bongkar muat barang sampai 4 hari. Jika melebihi batas waktu yang diberikan terse-



Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

but, maka truk yang parkir di dalam terminal terpaksa harus keluar.

Soal truk parkir di tepi Jalan Mahendradatta, saat ini masih dicarikan solusi. Hari Edi menyebutkan, pihaknya masih berupaya memperluas lahan terminal. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemilik lahan di sebelah barat terminal. Luas lahan yang hendak digunakan itu adalah

2 hektar.

Sebelumnya, deretan truk parkir di sepanjang Jalan Mahendradatta, Denpasar sering dikeluhkan masyarakat. Sebab, deretan truk yang parkir itu memakan sebagian badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas bahkan sering menimbulkan kemacetan.

Pihak terkait berulang kali telah melakukan penertiban, namun para sopir truk tetap membandel dan main kucing-kucingan. Alasan para sopir, mereka terpaksa parkir di sana karena menunggu giliran untuk bongkar muat. (kmb25)

OPINI ANDA

(0361) 7400391, 812987



Penyalur Utama
BHINEKA JAYA
Tel. 222053 - 224720

Topik : **PARIWISATA BALI BUKAN UNTUK KAPITALIS**

Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5

web : www.radioglobalfmbali.com

E-mail : info@radioglobalfmbali.com

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 2



Gedung Rusak

TK Sutha Prayoga Mengungsi

Negara (Bali Post) -

TK Sutha Prayoga dan Kelompok Bermain (KB) Sutha Lokasari yang sebelumnya menumpang di gedung SDN 1 Pohsanten, sejak dua minggu belakangan ini terpaksa mengungsi ke arena Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo. Dari informasi, TK dan KB yang tidak memiliki gedung itu, diminta pindah dari SD tersebut karena gedung SD rusak dan harus diperbaiki.

Kepala TK Sutha Prayoga Luh Sitiani, S.Pd., Senin (13/4) mengatakan TK tersebut memang menumpang di SDN 1 Pohsanten sejak September 2005 lalu karena tidak memiliki gedung. TK tersebut merupakan milik PKK Desa Pohsanten. "Menurut rencana gedung SDN 1 Pohsanten akan segera diperbaiki sehingga kami harus pindah, dan terpaksa kami meminjam arena desa," jelas Luh Sitiani.

Dikatakan arena Desa Pohsanten kondisinya juga tidak memungkinkan dipakai proses belajar mengajar karena atapnya bocor. "Jadi barang-barang kami taruh di arena desa, kalau barang dan berkas penting kami titip di bumdes," jelasnya.

sebulan dan bagi yang masih junior Rp 100 ribu.

"Kami ambilkan dari SPP siswa, sedangkan SPP siswa hanya Rp 25 ribu per bulan. Jadi dari sisa dana itu yang kami pakai untuk honor. Ya namanya pengabdian," tandasnya. Selain masalah gedung sekolah pihaknya juga menghadapi kendala dalam pengadaan mainan karena hingga saat ini belum punya. (kmb)

Dikatakannya sebenarnya dari pihak desa sudah mengusulkan untuk pembangunan gedung TK di areal halaman balai desa tersebut. Namun, belum diketahui kapan realisasinya. "Kami dengar informasi tahun ini, tapi tidak tahu kapan. Mudah-mudahan saja secepatnya," harapnya didampingi sejumlah guru lainnya.

Menurutnya ada enam pengajar di TK dan KB tersebut. Dua orang PNS sedangkan yang lainnya masih mengabdikan. Honor untuk guru abdi katanya juga tidak seberapa, bahkan seperti dirinya yang mengabdikan selama 26 tahun hanya menerima Rp 200 ribu